

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan penyelenggaraan pemerintah di Indonesia tidak terlepas dari konsep pemerintahan yang baik (good governance). Terselenggaranya Good Governance (Pemerintahan yang baik) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Good Governance adalah tata kelola organisasi secara baik dengan prinsip-prinsip keterbukaan, keadilan dan dapat dipertanggung jawabkan dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara baik dengan prinsip keterbukaan, keadilan, dan dapat dipertanggung jawabkan dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Tercapainya pengelolaan anggaran yang baik tidak terlepas dari adanya pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pengguna anggaran itu sendiri (pengawasan melekat). Selain dilakukan oleh atasan langsung pengguna anggaran itu sendiri, pengawasan juga dilakukan oleh legislatif dan lembaga pengawas khusus yang bertugas mengontrol proses perencanaan dan pengendalian anggaran. Pengawasan terhadap anggaran diperlukan untuk mengetahui apakah perencanaan yang telah disusun dapat berjalan secara efisien, efektif, dan ekonomis.

Fenomena yang dapat diamati dalam pengelolaan anggaran saat ini adalah menguatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas publik dan transparansi publik oleh organisasi sektor publik seperti unit-unit kerja pemerintah, baik pusat

maupun daerah. Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkap segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut. Sedangkan transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas, dimana seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan di pantau.

Annisaningrum (2010) mengatakan akuntabilitas adalah mempertanggung jawabkan pengelolaan sumberdaya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tinjauan yang telah ditetapkan secara periodic. Akuntabilitas merupakan kewajiban menyampaikan pertanggung jawaban atau untuk menjawab atau menerangkan kinerja tindakan seorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk minta keterangan dan pertanggung jawaban.

Prinsip akuntabilitas publik adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atas norma eksternal yang dimiliki oleh stakeholder yang berkepentingan dengan pelayanan tersebut. Setelah semua kegiatan tahapan selesai dilaksanakan maka langkah selanjutnya adalah menyusun laporan pertanggung jawaban (Akuntabilitas) oleh bendahara atasan langsung (Sekretaris) serta dibantu staf pengelola keuangan. Laporan pertanggung jawaban tersebut diperiksa langsung oleh Badan Pengawasan keuangan dan Pembangunan Wilayah Kabupaten

Majalengka sehingga semua dokumen yang berhubungan langsung dapat disediakan secara lengkap dan sempurna.

Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka merupakan instansi Pemerintah yang tidak luput dari sorotan publik mengenai pencapaian kerjanya. Adanya laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) yang merupakan evaluasi untuk dijadikan ukuran perbaikan kinerja di tahun berikutnya yang akan berdampak pada besarnya anggaran untuk membiayai kebutuhan instansi baik dalam belanja langsung maupun tidak langsung yang didalamnya mencakup biaya untuk program kegiatan.

Pengukuran kinerja tersebut didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk presentase, indeks rata-rata, angka dan jumlah. Presentase pencapaian rencana tingkat capaian dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat pencapaian semakin baik begitu pun sebaliknya. Sedangkan capaian kinerja bias dilihat dari sasaran dari tiap program, tetapi penulis hanya memasukan kegiatan atau program yang memiliki permasalahan baik itu dari penyerapan anggaran ataupun dari capaian kerjanya. Berikut adalah realisasi pencapaian program-program dan capaian kinerja di Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka.

Suatu lembaga/instansi dituntut memiliki pandangan untuk meningkatkan produktivitas pegawai. Kinerja pegawai merupakan hasil kerja seorang pegawai yang memiliki tugas, pokok, serta fungsinya selama periode tertentu yang berkaitan erat dengan pengelolaan sumber daya bagi suatu lembaga/instansi. Pada

dasarnya setiap pegawai menyadari bahwa dalam proses penyusunan anggaran harus dapat memenuhi target yang dianggarkan.

Dalam melakukan suatu pekerjaan, seorang pegawai hendaknya memiliki kinerja yang tinggi. Akan tetapi hal tersebut sulit untuk dicapai, bahkan banyak pegawai yang memiliki kinerja yang rendah atau semakin menurun walaupun telah banyak memiliki pengalaman kerja dan lembaga pun telah banyak melakukan pelatihan maupun pengembangan terhadap sumber daya manusianya, untuk dapat meningkatkan kemampuan dan motivasi kerja pegawainya. Kinerja pegawai yang rendah akan menjadi suatu permasalahan bagi sebuah organisasi atau lembaga, karena kinerja yang dihasilkan pegawai tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh organisasi.

Berikut adalah data Realisasi Program kegiatan Keuangan yang mempengaruhi Kinerja Pegawai:

Tabel 1. 1
Realisasi Program/Kegiatan Keuangan Disatuan Kerja Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka

No	Program/kegiatan	Tahun	Anggaran	Realisasi	Target Kinerja	Capaian Kinerja
1	Peningkatan Pengadaan Sistem Pelaporan Capaian Kerja (Penyusunan Perencanaan,Evaluasi, Monitoring dan Pelapran)	2013	213.739.550	192.407.850	100%	90.02%
		2014	283.789.550	106.871.650	100%	37.66%
		2015	293.291.800	171.376.600	100%	58.43%
		2016	273.057.550	194.489.180	100%	71.23%
		2017	9.200.000	9.119.000	100%	99.12%
2	Program Pendidikan Menengah (Penambahan Ruang Kelas Sekolah)	2013	5.117.340.400	4.254.262.715	100%	83.13%
		2014	7.467.783.800	7.095.900.100	100%	95.02%
		2015	21.803.200.200	21.220.050.500	100%	97.33%
		2016	22.180.437.600	17.539.083.220	100%	79.07%
		2017	25.686.534.800	20.884.868.150	100%	81.31%
3	Program Pendidikan Non Formal (Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan)	2013	208.500.000	207.474.500	100%	99.51%
		2014	626.486.000	623.458.950	100%	99.52%
		2015	1.234.115.000	1.202.052.500	100%	97.40%
		2016	1.112.034.900	788.514.550	100%	70.28%
		2017	1.601.140.000	1.382.554.500	100%	86.53%
4	pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	2013	552.580.995	538.752.150	100%	97.50%
		2014	371.760.000	337.380.029	100%	90.75%
		2015	581.000.000	532.703.200	100%	91.69%
		2016	546.229.995	117.811.500	100%	21.58%
		2017	498.229.995	496.657.995	100%	99.68%

Sumber data : Laporan Keuangan Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan pada Realisasi Keuangan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka dapat dilihat dari kegiatan atau program Peningkatan Pengadaan Sistem Pelaporan Capaian Kerja (Penyusunan, Perencanaan, Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan) pada tahun 2013 dengan anggaran 213.739.550 dan realisasinya 192.407.850 dengan capaian kinerja 90.02%. Pada tahun 2014 dengan Target anggaran 283.789.550 sedangkan yang terealisasi hanya 106.871.650 dengan capaian kinerja menurun hanya 37.66%. Pada tahun 2015 dengan target anggaran sebesar 293.291.800 dengan realisasi 171.376.600 dan capaiannya meningkat menjadi 58.43%. Pada tahun 2016 target anggaran sebesar 273.057.550 dengan realisasi 194.489.180 dan capaiannya sebesar 71.23%. Selanjutnya pada tahun 2017 target anggaran mengalami penurunan hanya 9.200.000 dan realisasinya 9.119.000 capaian kinerjanya 99.12%. Selanjutnya pada program/kegiatan Program Pendidikan Menengah (Penambahan Ruang Kelas Sekolah pada tahun 2013 dengan target anggaran sebesar 5.117.340.400 dengan realisasi 4.254.262.715 dan capaian kinerjanya sebesar 83.13%. Pada tahun 2014 target anggarannya sebesar 7.467.783.800 dan realisasinya 7.095.900.100 dengan capaian kinerjanya 95.02%. Pada tahun 2015 target anggaran pada kegiatan ini sebesar 21.803.200.200 sedangkan realisasinya sebesar 21.220.050.500 dan capaian kinerjanya 97.33%. Selanjutnya pada tahun 2016 mendapat target anggaran 22.180.437.600 dan realisasinya 17.539.083.220 dengan capaian kinerja yang menurun menjadi 79.07%. Pada tahun 2017 target anggarannya sebesar 25.686.534.800 dengan realisasi 20.884.868.150 dan capaian kinernya naik lagi menjadi 81.31%. Pada

program Program Pendidikan Non Formal (Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan) pada tahun 2013 target anggaran sebesar 208.500.000 yang terealisasikan 207.474.500 dan capaian kinerjanya 99.51%. Pada tahun 2014 target anggaran 626.486.000 dan realisasinya 623.458.950 dengan capaian kinerja 99.52%. Pada tahun 2015 target anggarannya sebesar 1.234.115.000 realisasi 1.202.052.500 dengan capaian kinerja menurun menjadi 96.51%. Pada tahun 2016 target anggaran sebesar 1.122.034.900 akan tetapi hanya terealisasikan sebesar 788.514.550 sehingga capaian kerjanya mengalami penurunan lagi dari tahun 2015 hanya mencapai 70.28%. Pada tahun 2017 target anggaran sebesar 1.601.140.000 dan terealisasikan sebesar 1.382.554.500 dan capaian kinerjanya meningkat menjadi 86.53%. selanjutnya pada program/kegiatan pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan pada tahun 2013 memiliki target anggaran sebesar 552.580.697 dan realisasi 538.752.150 dengan capaian kerja 97.50%. Pada tahun 2014 target anggaran sebesar 371.760.000 dengan realisasi 337.380.029 dan capaian kinerja menurun menjadi 90.75%. Pada tahun 2015 target anggaran yaitu sebesar 581.000.000 dan realisasinya 532.703.200 sehingga capaian kinerjanya menjadi naik sebesar 91.69%. Sedangkan pada tahun 2016 target anggaran sebesar 546.055.000 dengan realisasi hanya mencapai 117.811.500 sehingga capaian kinerjanya juga mengalami penurunan menjadi 21.58%. Pada tahun 2017 memiliki target anggaran sebesar 552.580.697 dan realisasinya 538.752.150 dengan capaian kinerja naik lagi hingga mencapai 99.68%.

Berdasarkan data tabel diatas bahwa pada tahun 2016 realisasi anggaran pada pemerintah pendidikan kabupaten majalengka jika dilihat dari semua jumlah anggaran uraian program kegiatan tidak terealisasi sepenuhnya. Dilihat pada realisasi anggaran di nilai masih belum optimal dan tidak sesuai dengan target yang dianggarkan. Artinya masih banyak anggaran yang tidak terealisasi dan menyisakan banyak anggaran sehingga realisasi tidak mencapai target 100%, karena realisasi anggaran berada di bawah batas minimal yaitu 95%. Kinerja pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka dikatakan belum optimal karena diduga dipengaruhi oleh akuntabilitas publik. Salah satunya pada akuntabilitas program yang terlihat pada tabel 1.2 berikut.

Tabel 1. 2
Realisasi Program/Kegiatan Keuangan SKPD Dinas Pendidikan Majalengka

No	Program/kegiatan	Tahun	Anggaran	Realisasi	Target Kinerja	Capaian Kinerja
1	Program Pendidikan Menengah (Penambahan Ruang Kelas Sekolah)	2013	5.117.340.400	4.254.262.715	100%	83.13%
		2014	7.467.783.800	7.095.900.100	100%	95.02%
		2015	21.803.200.200	21.220.050.500	100%	97.33%
		2016	22.180.437.600	17.539.083.220	100%	79.07%
		2017	25.686.534.800	20.884.868.150	100%	81.31%
2	Program Pendidikan Non Formal (Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan)	2013	208.500.000	207.474.500	100%	99.51%
		2014	626.486.000	623.458.950	100%	99.52%
		2015	1.234.115.000	1.202.052.500	100%	97.40%
		2016	1.112.034.900	788.514.550	100%	70.28%
		2017	1.601.140.000	1.382.554.500	100%	86.53%
	pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	2013	552.580.995	538.752.150	100%	97.50%
		2014	371.760.000	337.380.029	100%	90.75%
		2015	581.000.000	532.703.200	100%	91.69%
		2016	546.229.995	117.811.500	100%	21.58%
		2017	498.229.995	496.657.995	100%	99.68%

Sumber data : Laporan Keuangan Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka

Berdasarkan tabel diatas, bahwa pada Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka pada tahun 2013-2017 dalam melaksanakan kegiatan akuntabilitas

program yang telah dianggarkan ternyata masih belum optimal dan tidak sesuai dengan target yang dianggarkan yang mana capaian realisasinya tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Bahkan pada pelaksanaan kegiatan/programnya ada kegiatan yang capaiannya jauh di bawah 50%. Seperti pada tahun 2016 pada program pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan yang hanya tercapai 21,58% .

Berdasarkan fenomena yang dijadikan fakta dan data yang diperoleh peneliti pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH AKUNTABILITAS PUBLIK TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti dapat mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut.

1. Capaian target pada tahun per 31 Desember 2016 jika dilihat dari semua jumlah anggaran uraian program/kegiatan tidak terealisasikan sepenuhnya (100%) dari target anggaran yang telah ditetapkan.
2. Masih belum optimalnya kinerja pegawai di Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka.

1.3 Rumusan Masalah

Dari permasalahan yang telah diuraikan pada latar belakang masalah diatas, dapat diketahui bahwa permasalahan mengenai Pengaruh Akuntabilitas

Terhadap Kinerja Pemerintah di Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan. Maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : “Seberapa besar pengaruh akuntabilitas publik terhadap kinerja pegawai pada Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka ?”

1.4 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas publik terhadap kinerja pegawai pada Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka.

1.5 Kegunaan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis mengharapkan mempunyai manfaat bagi pihak-pihak terkait antara lain :

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini mampu memberikan sumbangan pemikiran atau menambah pengetahuan tentang sistem akuntabilitas laporan keuangan serta dapat mengetahui seberapa besar pengaruh akuntabilitas publik terhadap kinerja pegawai pada Dinas Pendidikan kabupaten Majalengka.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Peneliti

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan peneliti dalam bidang Administrasi negara secara teoritis maupun praktis serta sebagai bahan untuk menerapkan dan membandingkan pengetahuan yang diperoleh penulis antara teori dengan kenyataan di lapangan.

b. Bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka

Dalam hal ini akan memperoleh tambahan informasi dan masukan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Dari hasil penelitian sebagai bahan informasi tentang data empiris yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan atau bahan acuan untuk peneliti selanjutnya.

d. Untuk Umum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti lain untuk menambah wawasan pengetahuan dan pengalaman yang berharga dalam menganalisis suatu fenomena Administrasi Publik dan untuk membandingkan dengan teori-teori yang diperoleh sebelumnya dan diharapkan dapat dijadikan acuan untuk studi-studi lanjutan dalam melakukan penelitian pada bidang yang sama secara lebih mendalam.

1.6 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah teori atau dalil serta pendapat para ahli yang tidak diragukan lagi kebenarannya dan digunakan sebagai pedoman penelitian, sebelum membahas tentang pengaruh akuntabilitas keuangan terhadap kinerja aparatur pemerintah, terlebih dahulu perlu diketahui definisi serta hal-hal yang berhubungan dengan kedua variabel tersebut. Kerangka pemikiran adalah jalan pikiran peneliti yang berkaitan dengan proses penelitian (Jauhari, 2008:30).

Berkenaan dengan syarat memperoleh gelar sarjana ilmu administrasi publik, maka terlebih dahulu peneliti akan menjelaskan pengertian administrasi publik menurut Herabudin dalam bukunya Administrasi Negara bahwa pengertian administrasi negara adalah “bagian dari ilmu politik, yang mempelajari penentuan kebijaksanaan negara dalam suatu proses. Oleh sebab itu, sebagai suatu ilmu yang diperoleh dari kedua ilmu pengetahuan ini, administrasi negara menghendaki dua macam syarat jika hendak dipahami. Pertama, perlu untuk mengetahui sesuatu mengenai administrasi umum, dan kedua harus diakui bahwa banyak masalah-masalah administrasi negara timbul dalam suatu kerangka politik” (Herabudin, 2015:17).

Sedangkan menurut Dimock (1992:19), “Administrasi Negara merupakan bagian administrasi umum yang mempunyai lapangan yang lebih luas, yaitu suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari bagaimana lembaga-lembaga mulai dari satu keluarga hingga perserikatan bangsa-bangsa disusun, digerakan dan dikemudikan.”

Menurut Soetrisno (1981: 15) Administrasi keuangan negara merupakan salah satu lingkup keuangan negara yang pembahasannya menacakup badan hukum publik baik keuangan negara maupun badan hukum yang lebih rendah, pembahasan biasanya ditekankan pada segi-segi yang berhubungan dengan pengeluaran negara, penerimaan negara termasuk perpajakan dan hutang negara, serta anggaran negara.

Administrasi publik adalah proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan,

mengimplementasikan dan mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Chandler dan Plano (Dalam Pasolong, 2013:7).

Peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa administrasi publik adalah suatu sistem yang telah dirumuskan sebagai seluruh proses baik yang dilakukan organisasi atau perorangan yang berkaitan dengan penerapan atau pelaksanaan terhadap implementasi kebijaksanaan pemerintah terhadap pelayanan publik demi tercapainya tujuan secara teratur bekerjasama untuk tujuan bersama.

Dalam penjelasan Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 pasal 1 huruf 1 tentang keuangan negara dinyatakan bahwa pendekatan yang digunakan dalam merumuskan pengertian keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Menurut Dimock dan Dimock (1992:280) administrasi keuangan negara ialah pembukuan. Pembukuan adalah seni untuk mencatat, mengumpulkan, dan akhirnya meringkaskan dalam bentuk laporan keuangan akibat keuangan dari tindak eksekutif.

Sumarsono Sonny (2010:35), keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban pemegang amanah (pemerintahan) untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan,

melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut. (Mardiasmo 2009:20).

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti berpendapat bahwa akuntabilitas adalah perbandingan antara kesadaran atas pertanggung jawaban yang dilakukan dengan pemanfaatan sumber daya yang ada, dan bagaimana tindakan yang harus dimiliki oleh setiap pegawai agar senantiasa menjadi lebih baik sebelumnya, dalam memanfaatkan waktu kerja dan lain sebagainya.

Untuk lebih menjelaskan mengenai akuntabilitas dan mengukur maksimal atau tidaknya tingkat akuntabilitas, menurut Mardiasmo mengemukakan empat dimensi akuntabilitas, yaitu:

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran

Akuntabilitas hukum terkait dengan dilakukannya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam organisasi, sedangkan akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, korupsi dan kolusi. Akuntabilitas hukum menjamin adanya praktik organisasi yang sehat.

2. Akuntabilitas proses

Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif dan murah biaya. Pengawasan

dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan akuntabilitas proses dapat dilakukan misalnya dengan memeriksa ada tidaknya mark up dan pungutan-pungutan lain diluar yang ditetapkan, serta sumber-sumber inefisiensi dan pemborosan yang menyebabkan mahalnya biaya pelayanan publik dan kelambanan dalam pelayanan. Pengawasan dan pemeriksaan terhadap proses tender untuk melaksanakan proyek-proyek publik. Yang harus dicermati dala, pemberian kontrak tender adalah apakah proses tender telah dilakukan secara fair melalui Compulsory Competitive Tendering (TTC) ataukah dilakukan melalui pola korupsi, kolusi dan Nepotisme (KKN).

3. Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program juga berarti bahwa program-program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu dan mendukung strategi dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Lembaga publik harus memepertanggung jawabkan program yang telah dibuat samai pada pelaksanaan program.

4. Akuntabilitas kebijakan

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggung jawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

Akuntabilitas sektor publik tidak bias melepaskan diri dari pengaruh kecenderungan menguatnya tuntutan akuntabilitas sektor publik tersebut. Akuntansi sektor publik dituntut dapat menjadi alat

perencanaan dan pengendalian organisasi sektor publik secara efektif dan efisien, serta memfasilitasi terciptanya akuntabilitas publik.

Kinerja pegawai dalam lingkup kajian organisasi adalah secara makro, tujuan, dan cita-cita dan harapan suatu organisasi yang diusahakan pencapaiannya dan perwujudannya melalui organisasi tersebut. Bahwa sekelompok orang yang memiliki kesetiaan kepentingan juga diusahakan pencapaiannya melalui organisasi, sedangkan pada tingkat individu, berbagai tujuan, keinginan, cita-cita, harapan, dan kebutuhannya hanya bisa tersalurkan, terpenuhi dan terpuaskan dengan menggunakan jalur organisasional. Dikatakan sedemikian maksudnya adalah karena ada hubungan ketergantungan antara manusia dengan organisasi dalam arti bahwa manusia tidak mungkin lagi mencapai berbagai tujuannya tanpa menggunakan jalur organisasional dan sebagainya.

Menurut Simamora (2003:45) kinerja adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai misinya.

Pengertian pegawai dalam Bahasa Indonesia berasal dari kata “Pe” dan “Gawai”. Pe adalah sebuah awalan yang menunjukkan arti orang yang mengerjakan atau mempunyai pekerjaan. Sedangkan gawai berarti kerja (Tim Dosen IKIP Malang 1990:179).

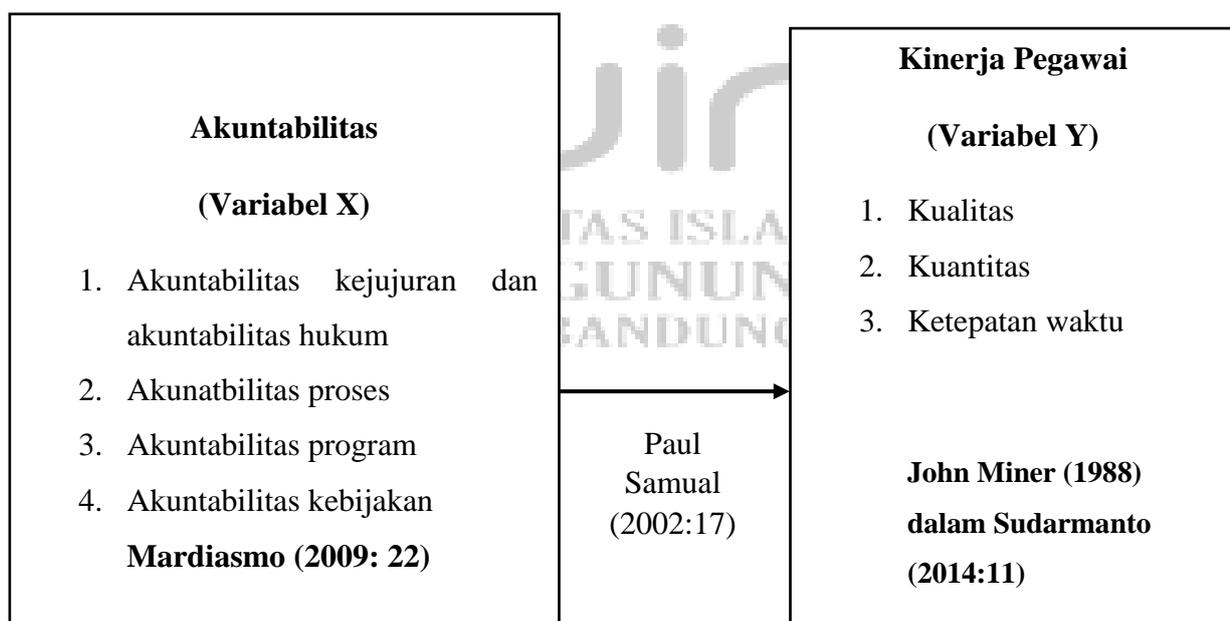
Pengertian kinerja pegawai adalah kesediaan seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan suatu kegiatan dan menyempurnakannya sesuai tanggung jawabnya dengan hasil seperti yang diharapkan. (Rivai, 2005:15).

Dimensi dari Kinerja Pegawai ini adalah sebagai berikut:

1. Kuantitas, yaitu jumlah yang harus diselesaikan atau dicapai pengukuran kuantitas melibatkan perhitungan keluaran dari proses atau pelaksana kegiatan. Ini berkaitan dengan jumlah keluaran yang dihasilkan.
2. Kualitas, yaitu mutu yang harus dihasilkan (baik atau tidaknya). Pengukuran ini mencerminkan pengukuran “tingkat kepuasan”, yaitu seberapa baik penyelesaiannya. Ini berkaitan dengan bentuk keluaran.
3. Ketetapan waktu, yaitu sesuai tidaknya dengan waktu yang direncanakan. Pengukuran ketepatan waktu merupakan jenis khusus dari pengukuran kuantitatif yang menentukan ketepatan waktu penyelesaian suatu kegiatan.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka dapat dibuat skema kerangka pemikiran sebagai berikut:

Tabel 1. 3
Model Kerangka Pemikiran



1.7 Hipotesis

Ulbert Silalahi (2012:160), hipotesis merupakan satu tipe proporsi yang langsung dapat diuji. Oleh karena itu hipotesis selalu mengambil bentuk atau dinyatakan dalam kalimat pernyataan (declarative) dan dalam pernyataan ini secara umum dihubungkan satu atau lebih variabel dengan variabel lain.

Hipotesis adalah pernyataan atau jawaban tentative atas masalah dan kemudian hipotesis dapat di verifikasi setelah hipotesis diuji secara empiris. Tujuan pengujian hipotesis ialah untuk mengetahui kebenaran atau ketidakbenaran untuk menerima atau menolak jawaban tentatif.

Sugiyono (2009:28) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dikatakan sementara karena jawaban yang dikemukakan baru berdasarkan teori yang peneliti peroleh, belum berdasarkan fakta-fakta yang di peroleh melalui pengumpulan dan analisis data.

Berdasarkan kerangka pemikiran yang dikemukakan diatas, maka penulis mengemukakan hipotesis penelitian sebagai berikut:

$H_0 : p = 0$, diduga tidak terdapat pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja Pegawai di Pemerintah di Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka

$H_a : p \neq 0$, diduga terdapat pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja pegawai di Pemerintah Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka.